

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka akan berdampak pada pelayanan permohonan informasi publik.

4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

Peringatan

	Nomor SOP 45 Tahun 2024
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	Tanggal Pembuatan 12 Mei 2023
	Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
	Tanggal Efektif
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT	Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT Pembina Tingkat I NIP 19720512 199101 1 001
	Judul SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	1. Pendidikan minimal Sarjana
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memahami Pendokumentasian, Kearsipan, dan Pengelolaan Informasi
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kete	erbukaan 3. Memahami dan menguasi teknologi informasi
Informasi Publik.	
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Info	rmasi Publik
5. Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokul	
NTT	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk	1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Keluar	2. Komputer.
SOP Pengujian Tentang Konsekuensi	3. Internet
4. SOP Penetanan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Puhlik yang Dikecualikan	Δ Printer.

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

		Pelaksana					Mutu Baku		
No.	. Tahap Kegiatan	Penanggung Jawab PPID Pengelola	Ketua PPID Pengelola	Sekretaris PPID Pengelola	Bidang - Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Memerintahkan Ketua PPID Pengelola untuk melakukan pemuktahiran daftar informasi publik	Mulai				Agenda Kerja	10 Menit	Agenda Kerja	
2	Menugaskan Sekretaris PPID Pengelola untuk melakakan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang - bidang berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi		<u> </u>			Agenda Kerja	20 Menit	Disposisi	
3	Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan bidang - bidang berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi					Disposisi	1 Hari	Ceklis data dan informasi yang akan dikumpulkan	
	Memberikan Daftar informasi yang telah diverifikasi oleh Kasubag yang bertanggungjawab.					Ceklis data dan informasi yang akan dikumpulkan	1 Hari	Daftar Informasi yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kasubag/Kasubid yang bersangkutan	
	Mengklasifikasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya, serta memberikannya pada Ketua PPID Pengelola					Daftar Informasi yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kasubag/Kasubid yang bersangkutan	1 Hari	Draf Daftar Informasi Publik	
	Memeriksa dan memaraf draf daftar informasi publik. jika draf yang diberikan disetujui, jika tidak maka draf daftar informasi publik dikembalikan pada Sekretaris PPID Pengelola		\	TIDAK	l .	Draf Daftar Informasi Publik	1 Jam	Draf Daftar Informasi Publik	
7	Memeriksa draf daftar informasi publik. Jika setuju menandatangani Daftar Informasi Publik (DIP) Secara Resmi dan memerintahkan Ketua untuk mengumumkan DIP tersebut kepada masyarakat. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Ketua untuk diperbaiki.		TIDAK			Draf Daftar Informasi Publik	1 Jam	Daftar Informasi Publik Disposisi	
8	Menyerahkan DIP kepada Sekretaris PPID Pengelola untuk didokumentasikan					Daftar Informasi Publik Disposisi	20 Menit	Daftar Informasi Publik Disposisi	
	Mendokumentasikan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke Website Resmi Pemerintah Daerah maupun sarana informasi lainnya.			Selesai		Daftar Informasi Publik Disposisi	15 Menit	Daftar Informasi Publik, Bukti Dokumentasi	